

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA SANGAT TERTINGGAL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021-2022

Oleh: Ninda Amelia Putri
Pembimbing: Dr. Auradian Marta, S.IP, M.A

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 2829
Telp/Fax.0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang strategi pembangunan desa sangat tertinggal dan melihat bagaimana upaya dari Pemerintah Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam pengentasan masalah desa sangat tertinggal yang berada di Kabupaten Kampar. Karena berdasarkan data Indeks Desa Membangun yang terdiri dari tiga indeks komposit yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan tahun 2021-2022 ditemukan bahwa 24 desa sangat tertinggal terdapat di Provinsi Riau dan sebanyak 23 desa sangat tertinggal berada di Kabupaten Kampar tepatnya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di kawasan desa sangat tertinggal terlebih lagi 9 desa sangat tertinggal berada dalam kawasan konservasi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah primer yang diperoleh melalui wawancara dan data data sekunder berasal dari dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penulis menggunakan teori Rahardjo Adisasmita tentang strategi pembangunan yang terdiri dari 4 strategi yaitu *the growth strategy* atau strategi pertumbuhan, *the welfare strategy* atau strategi kesejahteraan, *the responsive strategy* atau strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan *the holistic strategy* atau strategi terpadu. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kesejahteraan atau *the welfare strategy* yang paling dominan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dimana pemerintah sibuk untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan terutama dibidang sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian untuk strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat atau *the holistic strategy* Pemerintah Kabupaten Kampar belum mampu untuk memenuhi permintaan masyarakat atas kebutuhan internet di 20 desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. BBKSDA Provinsi Riau juga mengambil posisi penting dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan suakamargasatwa.

Kata Kunci : Strategi, Pembangunan, Desa Sangat Tertinggal

ABSTRACT

This research discusses the development strategy of very disadvantaged villages and sees how the efforts of the Regional Government and related Regional Apparatus Organizations in alleviating the problem of very disadvantaged villages in Kampar Regency. Because based on the Village Development Index data which consists of three composite indices, namely the Social Resilience Index, Economic Resilience Index and Environmental Resilience Index in 2021-2022, it was found that 24 very underdeveloped villages were in Riau Province and as many as 23 very underdeveloped villages were in Kampar Regency, precisely in the Kampar Kiri Hulu District. Therefore, this research aims to find out the development strategies used by the local government in accelerating development in very underdeveloped village areas, especially since 9 very underdeveloped villages are located in the Bukit Rimbang Bukit Baling Wildlife Sanctuary conservation area.

The research methodology used by the author is descriptive qualitative. The type of data used is primary obtained through interviews and secondary data data comes from documents related to the research. Data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data and drawing conclusions.

The author uses Rahardjo Adisasmita's theory of development strategies consisting of 4 strategies, namely the growth strategy or growth strategy, the welfare strategy or welfare strategy, the responsive strategy or strategy that is responsive to community needs and the holistic strategy or integrated strategy. The results showed that the most dominant welfare strategy or the welfare strategy was carried out by the Kampar Regency Government where the government was busy improving the welfare of the community through development programs, especially in the field of road and bridge infrastructure facilities and infrastructure. Then for a strategy that is responsive to community needs or the holistic strategy, the Kampar Regency Government has not been able to meet community demand for internet needs in 20 villages in Kampar Kiri Hulu District. BBKSDA Riau Province also takes an important position in community empowerment in the suakamargasatwa area.

Keywords: Strategy, Development, Highly Disadvantaged Villages

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia memiliki cita-cita pada dasar negara yang mulia, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan Negara Indonesia setelah merdeka. Negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih spesifik meliputi pemerintah pusat yakni presiden, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat pada tiap-tiap daerah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menyejahterakan rakyat dengan pemenuhan segala kebutuhan sosialnya sebagai bentuk pelaksanaan dari amanah konstitusi. Maka dari itu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih berperan aktif dalam pelayanan, pembangunan, pengaturan dan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga tercipta stabilitas kehidupan masyarakat.

Salah satu peran penting pemerintah daerah adalah mengembangkan daerah yang masih memiliki desa yang masih berstatus

“desa sangat tertinggal” dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang ada. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 pasal 1 menyebutkan bahwa desa sangat tertinggal atau bisa disebut sebagai desa pratama, adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun mengklasifikasikan status desa menjadi 5 yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan berbagai indeks. Indeks Desa Membangun dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Indeks Desa Membangun dijadikan rujukan oleh pemerintah untuk mengentaskan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal kemudian meningkatkan jumlah desa mandiri di seluruh Indonesia.

Indeks Desa Membangun (IDM) ini disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi, desa membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan desa. Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait

dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Status desa ditentukan berdasarkan tiga indikator dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun ayat 3 pasal 1 Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kampar dalam bukunya yang berjudul “Statistik Daerah Kabupaten Kampar 2022”, Kabupaten Kampar dengan ibukota Bangkinang merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Riau setelah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir. Luas wilayah Kabupaten Kampar mencapai 11.289,28 km2 dan terdiri dari 21 kecamatan, 8 kelurahan dan 242 desa. Berdasarkan hasil data IDM pada tahun 2021 dan 2022 se- Provinsi Riau, Kabupaten Kampar dengan status IDM berkembang di urutan ke-8 pada tahun 2021 dengan nilai rata-rata 0,6565 dan naik satu tingkat di urutan ke-7 pada tahun 2022 dengan nilai rata-rata 0,6808.

Tabel 1. Peringkat Status IDM di Provinsi Riau Tahun 2021 dan 2022

No	Kabupaten	Nilai IDM 2021	Status	Kabupaten	Nilai IDM 2022	Status
1.	Bengkalis	0,7466	Maju	Bengkalis	0,7699	Maju
2.	Pelalawan	0,7428	Maju	Pelalawan	0,7698	Maju
3.	Siak	0,7335	Maju	Siak	0,7424	Maju
4.	Indragiri Hulu	0,6753	Berkembang	Kuantan Singingi	0,7071	Berkembang
5.	Rokan Hulu	0,6719	Berkembang	Indragiri Hulu	0,7050	Berkembang
6.	Rokan Hilir	0,6653	Berkembang	Rokan Hulu	0,6955	Berkembang
7.	Kuantan Singingi	0,6610	Berkembang	Kampar	0,6808	Berkembang
8.	Kampar	0,6565	Berkembang	Rokan Hilir	0,6776	Berkembang
9.	Kepulauan Meranti	0,6301	Berkembang	Indragiri Hilir	0,6535	Berkembang
10.	Indragiri Hilir	0,6198	Berkembang	Kepulauan Meranti	0,6525	Berkembang

Sumber : Indeks Desa Membangun

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar menempati urutan ke-7 di tahun 2022 pada tingkat Provinsi dengan status IDM berkembang. Namun pembangunan daerah Kabupaten Kampar tidak berhenti pada status yang telah dicapai. Masih banyak desa-desa di Kabupaten

Kampar yang memerlukan perhatian lebih untuk mencapai taraf kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Tabel 2. Jumlah Desa Sangat Tertinggal Di Provinsi Riau Tahun 2021-2022

No	Kabupaten	Jumlah
1.	Kampar	23 Desa
2.	Kepulauan Meranti	1 Desa

Sumber : Cakaplah.com

Tabel ini menunjukkan bahwa dari 10 kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar mendominasi dengan jumlah desa sangat tertinggal sebanyak 23 desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa sangat tertinggal perlu dilakukan usaha lebih maksimal daripada desa yang sudah tergolong berkembang atau maju, karena pada desa sangat tertinggal masih memiliki beragam masalah terutama pada ketimpangan-ketimpangan pembangunan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dan arah perkembangan desa seperti lokasi, atau letak desa terhadap pusat-pusat fasilitas serta tidak memiliki jalan perhubungan antar desa sehingga diperlukan usaha yang lebih untuk mengatasi hal-hal yang menyebabkan desa tersebut tertinggal dan mengapa terjadi demikian.

Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang minim sentuhan pembangunan, terutama infrastruktur jalan dan jembatan. Secara umum sumber perekonomian masyarakat adalah berkebun karet dan berladang. Sehingga masyarakat susah

untuk pemasarannya. Di samping itu bidang pariwisata pun sangat memungkinkan untuk digarap secara maksimal, terutama wisata alam dan budaya karena sebagian desa yang berada di kecamatan ini berada di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling dan berada di sepanjang aliran sungai Subayang. Sebab, kondisi sosial masyarakat Kampar Kiri Hulu sangat tergantung pada kondisi alam. Jika akses jalan terkendala karena disebabkan oleh musim hujan, maka roda perekonomian masyarakat terhambat.

Adanya permasalahan tersebut masyarakat mengeluhkan bertambahnya biaya ongkos dan biaya hidup sehari-hari. Menurut masyarakat desa memang ada pembangunan di beberapa titik, akan tetapi pembangunan tersebut terkesan sangat lamban.

Adanya permasalahan tersebut masyarakat mengeluhkan bertambahnya biaya ongkos dan biaya hidup sehari-hari. Menurut masyarakat desa memang ada pembangunan di beberapa titik, akan tetapi pembangunan tersebut terkesan sangat lamban.

Tabel 3. Daftar Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Kampar Tahun 2021-2022

No	Desa	Nilai IDM 2021	Nilai IDM 2022	Status
1.	Tanjung Belit	0,4635	0,4635	Sangat Tertinggal
2.	Tanjung Belit Selatan	0,4749	0,4697	Sangat Tertinggal
3.	Koto Lama	0,4659	0,4884	Sangat Tertinggal
4.	Batu Sanggan	0,4808	0,4903	Sangat Tertinggal
5.	Aur Kuning	0,4532	0,4532	Sangat Tertinggal
6.	Ludai	0,4410	0,4448	Sangat Tertinggal
7.	Tanjung Karang	0,4437	0,4676	Sangat Tertinggal
8.	Batu Sasak	0,4637	0,4732	Sangat Tertinggal
9.	Pangkalan Kapas	0,4738	0,4738	Sangat Tertinggal
10.	Kebun Tinggi	0,4648	0,4648	Sangat Tertinggal
11.	Tanjung Beringin	0,4422	0,4498	Sangat Tertinggal
12.	Gajah Bertalut	0,4852	0,4852	Sangat Tertinggal
13.	Danau Sontul	0,4452	0,4841	Sangat Tertinggal
14.	Pangkalan Serai	0,4284	0,4513	Sangat Tertinggal

No	Desa	Nilai IDM 2021	Nilai IDM 2022	Status
15.	Dua Sepakat	0,4130	0,4130	Sangat Tertinggal
16.	Terusan	0,4452	0,4844	Sangat Tertinggal
17.	Deras Tajak	0,4538	0,4649	Sangat Tertinggal
18.	Sungai Santi	0,4392	0,4411	Sangat Tertinggal
19.	Subayang Jaya	0,4624	0,4825	Sangat Tertinggal
20.	Tanjung Permai	0,4757	0,4681	Sangat Tertinggal
21.	Bukit Betung	0,4765	0,4697	Sangat Tertinggal
22.	Muaro Bio	0,4606	0,4606	Sangat Tertinggal
23.	Lubuk Ligau	0,4795	0,4795	Sangat Tertinggal

Sumber : *Website* Indeks Desa Membangun

Data di atas menunjukkan bahwa 23 desa sangat tertinggal di Kabupaten Kampar semuanya berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang terdiri dari 24 desa. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa desa sangat tertinggal semuanya berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu terbatasnya infrastruktur minimnya jumlah sarana pendidikan, kesehatan, listrik, teknologi, rendahnya ekonomi masyarakat dan transportasi yang kondisi jalannya sangat rusak bahkan ada desa yang hanya bisa di tempuh melalui transportasi air dan akses untuk menempuh ke desa-desa dari ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten cukup jauh dan memakan waktu yang lama.

Aksesibilitas desa-desa yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu untuk menempuh ke ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten sangatlah berbeda dan jauh. Ada beberapa desa yang akses untuk menuju ke lokasi tujuan hanya bisa ditempuh oleh transportasi air seperti sampan karena akses utama hanya melalui sungai. Belum adanya akses jalan darat yang memungkinkan perkembangan desa akan lebih cepat dan mengurangi penghambatan perekonomian masyarakat di desa tersebut. Bupati Kampar juga menemukan berbagai permasalahan yang mendasar, permasalahan yang paling utama dihadapi oleh masyarakat yang berada di pinggir

sungai di antaranya adalah persoalan transportasi, komunikasi, listrik, kesehatan, pendidikan dan persoalan lainnya.

Oleh karena itu penulis menjabarkan beberapa fenomena yang akan di kemukakan terkait dengan desa sangat tertinggal :

1. 24 desa sangat tertinggal yang berada di Provinsi Riau, 23 desa berada di Kabupaten Kampar.
2. Dari tahun 2021-2022 jumlah desa sangat tertinggal di wilayah ini jumlahnya stagnan yaitu 23 desa. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa strategi yang digunakan pemerintah belum mampu untuk mengurangi jumlah desa sangat tertinggal di Kabupaten Kampar.
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana infrastruktur minimnya jumlah sarana pendidikan, kesehatan, listrik, teknologi, rendahnya ekonomi masyarakat dan transportasi yang beberapa diantaranya hanya dapat diakses melalui transportasi sungai.

Dari fenomena yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2022”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan penulis, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana strategi pembangunan desa sangat tertinggal oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2022?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan strategi Pembangunan desa sangat tertinggal oleh pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2022?
2. Manfaat akademis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama kajian dibidang ilmu pemerintahan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi penelitian maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
3. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana strategi pembangunan desa sangat tertinggal oleh pemerintah daerah, terkhusus bagi pemerintah daerah terkait maupun instansi terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka pembangunan desa sangat tertinggal.

D. KERANGKA TEORI Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Adisasmita (2013) menyebutkan bahwa setiap negara menerapkan strategi pembangunannya untuk memecahkan masalahnya terutama

menyangkut pertumbuhan penduduk, kemiskinan, urbanisasi dan pengangguran masyarakatnya. Program dan kegiatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan bidang sosial budaya lainnya. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan terdapat 4 jenis strategi yaitu:

1. Strategi Pertumbuhan (*The Growth Strategy*) dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat pedesaan
2. Strategi Kesejahteraan (*The Welfare Strategy*) untuk mencapai taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan pemukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi serta pembuatan prasarana sosial lainnya.
3. Strategi yang Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat (*The Responsive Strategy*) strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan pihak luar untuk memperlancar usaha mandiri melalui

pengadaan teknologi dan tersedianya sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan.

4. Strategi Terpadu atau Menyeluruh (*The Integrated Strategy*) dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan.

Kunci dari pembangunan sebuah daerah adalah strategi pembangunan daerah tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga dibutuhkan pula pendekatan pembangunan yang bersifat *bottom up*.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau hasil gambar penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan untuk bukti presentasi data itu mencakup wawancara, fotografi dan dokumentasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Kampar dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan penelitian yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan lain-lain.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, baik itu dari individu atau perseorangan di lapangan, seperti hasil dari proses wawancara, survei atau pengisian kuesioner yang biasanya dilakukan oleh peneliti (Husein, 2013).

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku, dokumen, media *online*, jurnal dan lainnya yang berhubungan dan relevan dengan penelitian.

4. Sumber Data

a. Informan

Sumber data penelitian dapat dilihat daftar informan pada tabel berikut :

Tabel 4 Daftar Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Fitra Yati dan Jaya Gunawan	Staf Bidang Penyuluhan BBKSDA Provinsi Riau
2.	Edison, S.Sos	Koordinator Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Kampar
3.	Afruddin Amga, S.T., M.T	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Kampar

No	Nama	Keterangan
4.	Lukmansyah Badoe, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Dinas PMD Kabupaten Kampar
5.	Ibrahim, S.Pd, M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Dinas PMD Kabupaten Kampar
6.	Mazri, S.E	Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu
7.	Efri Desmi	Kepala Desa Tanjung Belit
8.	Rusdi Sahar, S.Pd	Kepala Tanjung Belit Selatan
9.	Prio, Rizman, Dedi Canra	Masyarakat Desa

Sumber : Data Olahan Penulis, 2024

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung antara informan dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian

6. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan pada penelitian ini penulis menggunakan teori strategi pembangunan yang terdiri dari empat

strategi yaitu *the growth strategy* (strategi pertumbuhan), *the welfare* (strategi pembangunan), *the responsive strategy* (strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat) dan *the integrated* (strategi terpadu). Kemudian teori dielaborasi oleh penulis berdasarkan temuan-temuan di lapangan.

1. The Growth Strategy (Strategi Pertumbuhan)

The growth strategy atau strategi pertumbuhan adalah strategi yang dilakukan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam segi ekonomi melalui beberapa cara seperti meningkatkan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat pedesaan.

Strategi pertumbuhan dalam melakukan pembangunan yang ada pada desa sangat tertinggal di kawasan Kampar Kiri Hulu Tahun 2021-2022 adalah :

Pertama, dalam sektor permodalan yaitu pengembangan lembaga pembiayaan dengan penyediaan Kredit Usaha Rakyat tahun 2021

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu perangkat Desa Tanjung Belit Selatan Redhollah mengatakan :

“...dalam sektor permodalan masyarakat disini sudah ada tersedia KUR di desa ini.” (Wawancara, 27 Mei 2024)

KUR atau Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong inklusi keuangan agar akses layanan perbankan dengan bunga murah dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. KUR bertujuan untuk akselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Selain itu keberadaan BRI-Link juga membantu warga di Desa

Tanjung Belit Selatan dalam hal melakukan setor maupun penarikan tunai.

Kedua, Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

Salah satu contoh desa di Kecamatan ini yang telah membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian adalah Desa Tanjung Belit Selatan. Dimana pemerintah desa membuat lampu jalan untuk penerangan akses ke jalan usaha tani. Hal ini dilatarbelakangi karena kondisi jalan pada saat musim hujan sangat licin dan berlumpur kemudian tidak tersedia penerangan, maka dari itu di buatlah lampu jalan agar memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertaniannya.

Selain itu, dalam wawancara penulis dengan kepala desa Tanjung Belit Selatan Bapak Rusdi Sahar, S.Pd dikatakan bahwa :

“Alhamdulillah kita buka semalam 2 kilometer udah terselamatkanlah kebun disitu sekitar 40 hektar adalah. (Wawancara, 22 Februari 2024)”

Dengan dibukanya jalan menuju ke kebun warga sepanjang 2 kilometer memudahkan transportasi dan aksesibilitas ke lahan pertanian. Jalan usaha pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang lahannya dulu susah untuk diakses pun merasa sangat terbantu berkat pembukaan jalan usaha tani walaupun untuk saat ini hanya sepanjang 2 kilometer saja.

Ketiga, BBKSDA Provinsi Riau juga melakukan kegiatan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif kepada masyarakat di Desa Pangkalan Serai yang merupakan desa terujung di kawasan Sungai Subayang yang juga berada dalam Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Bantuan tersebut berupa bantuan budidaya ternak kerbau sebanyak 3 ekor dengan nominal Rp50.000.000 kepada Kelompok Tani

Serai Bertuah Desa Pangkalan Serai. Diharapkan bantuan usaha ekonomi produktif ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar kawasan Suaka Margasatwa.

Keempat, Peningkatan kapasitas masyarakat di desa Aur Kuning, Desa Pangkalan Serai, dan Desa Subayang Jaya. Kegiatan ini merupakan salah satu program BBKSDA Provinsi Riau untuk masyarakat yang berada pada kawasan suakamargasatwa. Kegiatan dalam bentuk pelatihan ini berisikan tentang bagaimana budidaya jernang dan sistem agroforestry. Jernang merupakan tanaman jenis rotan yang buahnya digunakan untuk bahan baku pewarna industri keramik, marmer hingga sebagai bahan obat. Nilai jual yang tinggi dari buahnya mencapai 700 ribu hingga 900 ribu perkilogramnya diharapkan dapat membantu masyarakat di kawasan suakamargasatwa untuk meningkatkan kesejahteraannya walaupun berada di lingkungan hutan.

2. The Welfare Strategy (Strategi Kesejahteraan)

The welfare strategy atau strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional. Seperti peningkatan dalam hal pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan pemukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi serta pembuatan sarana dan prasarana sosial bidang lainnya.

Pembangunan jalan interpretasi menghubungkan sembilan desa yang berada di kawasan konservasi Bukit Rimbang Bukit Baling Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu Desa Tanjung Belit, Muara Bio, Batu Sanggan, Tanjung Beringin, Aur Kuning, Gajah Bertalut, Terusan, Subayang Jaya, serta Desa Pangkalan Serai. Jalan interpretasi yang dibangun memiliki lebar 1,5 meter dan

panjang 46 km. Selain itu juga dibangun jaringan listrik namun masih terhambat.

Pembangunan jalan interpretasi melibatkan kolaborasi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bagian SDA Setda Kampar, Dinas PUPR, Bappeda, PLN dan lainnya beserta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau. Sebelumnya juga dilakukan MoU kerja sama antara BBKSDA Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor : NK. 372/K.6/BTU/KUM.3/03/2019 dan 414.4/BUP KPR/2019/07 Tanggal 13 Maret 2019 tentang pengembangan Wisata alam terbatas sebagai penguatan fungsi kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling melalui pembangunan jalan interpretasi dan pengembangan penguatan fungsi masyarakat adat, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam kawasan yang mencakup seluas 16.400 ha pada 9 Desa.

Kemudian, penulis juga mewawancarai Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Kampar Bapak Afrudin Amga, S.T., M.T terkait hal ini beliau mengatakan bahwasannya :

“...disitu kita ada namanya jalan interpretasi kita bangun itu, itu kerja samanya lintas dinas lah begitu juga ada dari BBKSDA, PLN terkait penerangannya dari kita PUPR-nya juga.” (Wawancara, 5 februari 2024)

Perencanaan pembangunan jaringan listrik Tanjung Belit sampai Desa Pangkalan Serai lebih kurang sepanjang 30 km dengan jumlah tiang 1.056 batang masih terhambat akibat sulitnya moda transportasi material ke lokasi, curmanya kondisi geografis untuk menuju ke lokasi desa, akses menuju ke lokasi desa hanya jalur sungai, pembuatan satu lubang untuk tiang listrik memerlukan waktu dua hari karena kondisi tanah berbatu.

Saat ini sudah terbangun jalan interpretasi sepanjang 20 km beserta jembatan besi 3 buah dan jembatan

gantungan dan tiang listrik sebanyak 824 batang tiang listrik yang terpasang. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan dapat mengentaskan kemiskinan yang berada pada desa tersebut.

3. *The Responsive Strategy* (Strategi Yang Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat)

The responsive strategy atau strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat merupakan strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (self need assistance) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumberdaya yang sesuai kebutuhan di pedesaan.

Perencanaan pemanfaatan internet desa juga harus melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat desa itu sendiri. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak akan menghasilkan peningkatan terhadap kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam memanfaatkan internet untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengadaan internet berperan penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan internet, masyarakat pedesaan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka serta berkontribusi secara lebih aktif dalam perekonomian dan pembangunan nasional.

Maka dari itu penulis lebih lanjut melakukan wawancara dengan Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu Bapak Mazri, S.E.

“...komunikasi kayak telepon segala macam yang tercover benar-benar tercover plat merah lah bahasanya (Telkomsel) itu hanya Gema, Tanjung Belit, Tanjung Belit Selatan dan Bukit Betung, yang lainnya itu sekarang ada sinyal untuk internet untuk wifi karena masyarakat bekerja sama dengan pihak

ketiga dan hanya dapat dimanfaatkan untuk internet. Kalau kita bicara sinyal telepon itu tidak ada.” (Wawancara, 21 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mazri selaku Sekretaris Camat dapat disimpulkan bahwa tidak semua desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu memiliki jaringan untuk telepon seluler.

Pentingnya jaringan internet juga berdampak untuk peningkatan pendidikan dan kesehatan beserta sektor-sektor lain. Lebih lanjut dibahas oleh Bapak Afifuddin selaku tenaga ahli provinsi kemendes bahwa ada solusi Untuk keperluan akses komunikasi tersebut, Pemkab Kampar bisa memanfaatkan program yang dilaksanakan oleh Bakti Kominfo yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Bakti Kominfo menjalankan beberapa strategi, yaitu realisasi proyek strategis nasional (PSN) Palapa Ring, perluasan pembangunan base transceiver station (BTS) atau tower pemancar sinyal 4G, penyediaan akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dan pembangunan ekosistem digital.

Bapak Afifuddin juga menyampaikan, jika Pemkab Kampar tidak berhasil mendapatkan program Bakti Kominfo tersebut, maka Pemkab Kampar dapat memanfaatkan dana APBD untuk membangun akses komunikasi bagi daerah yang masih tertinggal dan terisolir di wilayah Kabupaten Kampar.

Percepatan pembangunan daerah yang masih tertinggal dan terisolir tidak hanya memerlukan pembangunan infrastruktur seperti jalan saja, tetapi pembangunan infrastruktur untuk akses komunikasi harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kampar. Karena keperluan akses komunikasi sudah menjadi keperluan dasar.

Mayoritas desa hanya memiliki jaringan internet yang diusulkan oleh pihak ketiga dengan membangun tower-tower mini. Fasilitas tersebut juga bukan diadakan oleh desa tetapi masyarakat

yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Lebih lanjut masih dalam wawancara dengan Sekcam dalam hal pembangunan jaringan :

“...sementara kalau kita bicara rencana sudah lama sih Telkomsel itu punya rencana kalau memungkinkan mereka akan bangun tower, katakanlah beberapa titik untuk menyambung seluruh wilayah itu. Tapi sampai sekarang pun PLN-nya aja belum tersambung seluruhnya.” (Wawancara, 21 Februari 2024)

Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa tertinggal adalah akses terhadap jaringan telekomunikasi. Hal ini disebabkan pada permasalahan dasar seperti pembangunan jaringan listrik yang belum memadai di wilayah tersebut.

Selain itu, terdapat juga program yang dijalankan BBKSDA Provinsi Riau terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang berada di Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Pentingnya pemberdayaan masyarakat desa di kawasan suaka margasatwa untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa juga bertujuan untuk mendukung kelestarian kawasan suaka margasatwa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang memerlukan rencana, strategi atau peta jalan agar kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang mendukung kelestarian suaka margasatwa dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pemberdayaan masyarakat dalam kawasan hutan tidak hanya pada program pemberian akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan. Pemberian akses kepada masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan harus didukung lebih awal dengan kegiatan pengembangan kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian kawasan suaka margasatwa. Pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penguatan

kelembagaan, dan perubahan sikap masyarakat.

Dalam wawancara penulis dengan Kak Fitra dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam :

“itu kalau untuk secara pemberdayaan bersama dengan pemma tidak ada, dan itu program murni dari BBKSDA untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan suaka margasatwa, programnya ada kelompok tani hutan.” (Wawancara, 27 Mei 2024)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kak Fitra ditemukan bahwa pemberdayaan masyarakat di kawasan suaka margasatwa murni program yang dilakukan BBKSDA itu sendiri dan tidak ada campur tangan dari pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah dengan pembentukan kelompok tani hutan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Bantuan kepada kelompok tani hutan pada tahun 2021 Desa Pangkalan Serai yang mendapat bantuan berupa hewan ternak yaitu kerbau, dan pada tahun 2022 tiga desa medapat bantuan berupa uang tunai. Program Kelompok Tani Hutan merupakan salah satu bentuk komitmen BBKSDA Provinsi Riau dalam memberdayakan masyarakat yang berada dalam kawasan suakamargasatwa dan sebagai upaya untuk membangun masyarakat sekitar hutan dengan memberi kesempatan untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengorbankan fungsi hutan itu sendiri.

Pada kawasan suaka margasatwa, konsep pemberdayaan pada prinsipnya bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat di sekitar kawasan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam pengelolaan potensi sumber daya berikut permasalahannya guna peningkatan kemandirian, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian kawasan suaka margasatwa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan rangkaian proses memberikan kapasitas kepada masyarakat. Kondisi yang diinginkan atas kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rentang lima tahun yakni meningkatnya dukungan masyarakat dan para pihak, penyiapan kelembagaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Pada akhirnya kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan mendukung pelestarian fungsi kawasan suaka margasatwa.

4. *The Integrated Strategy (Strategi Terpadu)*

The integrated strategy atau strategi terpadu ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan hidup pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan.

Tabel 5. Identifikasi Indikator IDM di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2021/2022

No	Desa	2021			2022		
		IKS	IKE	IKL	IKS	IKE	IKL
1.	Gema	0,583	0,433	0,600	0,70	0,53	0,60
2.	Tanjung Belit	0,457	0,333	0,600	0,46	0,33	0,60
3.	Tanjung Belit Selatan	0,491	0,333	0,600	0,53	0,42	0,47
4.	Koto Lama	0,514	0,283	0,600	0,55	0,32	0,60
5.	Batu Sanggan	0,526	0,250	0,667	0,55	0,25	0,67
6.	Aur Kuning	0,543	0,217	0,600	0,54	0,22	0,60
7.	Ludai	0,423	0,300	0,600	0,43	0,30	0,60

No	Desa	2021			2022		
		IKS	IKE	IKL	IKS	IKE	IKL
8.	Tanjung Karang	0,514	0,217	0,600	0,50	0,30	0,60
9.	Batu Sasak	0,474	0,317	0,600	0,50	0,32	0,60
10.	Pangkalan Kapas	0,571	0,317	0,533	0,57	0,32	0,53
11.	Kebun Tinggi	0,594	0,267	0,533	0,59	0,27	0,53
12.	Tanjung Beringin	0,560	0,233	0,533	0,58	0,23	0,53
13.	Gajah Bertalut	0,606	0,250	0,600	0,61	0,25	0,60
14.	Danau Sontul	0,486	0,317	0,533	0,49	0,43	0,53
15.	Pangkalan Serai	0,469	0,217	0,600	0,54	0,22	0,60
16.	Dua Sepakat	0,406	0,300	0,533	0,41	0,30	0,53
17.	Terusan	0,486	0,183	0,667	0,52	0,33	0,60
18.	Deras Tajak	0,411	0,283	0,667	0,41	0,32	0,67
19.	Sungai Santi	0,434	0,283	0,600	0,44	0,28	0,60
20.	Subayang Jaya	0,537	0,183	0,667	0,51	0,33	0,60
21.	Tanjung Permai	0,577	0,317	0,533	0,55	0,32	0,53
22.	Bukit Betung	0,463	0,367	0,600	0,53	0,42	0,47
23.	Muaro Bio	0,549	0,233	0,600	0,55	0,23	0,60
24.	Lubuk Bigau	0,589	0,317	0,533	0,59	0,32	0,53

Sumber : *Website* Indeks Desa Membangun

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa permasalahan dari 23 desa sangat tertinggal pada tahun 2021 dan 2022 nilai terendah rata-rata terletak pada indeks ketahanan ekonomi dengan ambang batas nilai <0,491 dimana dalam indeks tersebut terdiri dari keberagaman produktivitas masyarakat desa, ketersediaan pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi logistik, akses ke lembaga keuangan dan

perkreditan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah.

Hal tersebutlah yang menjadikan fokus utama pengentasan desa sangat tertinggal oleh Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa yaitu mengintervensi pengembangan dibagian sumber daya alam dan ekonomi untuk membawa peningkatan poin dalam Indeks Desa Membangun.

Tabel 6. Identifikasi *Stakeholder* dan Perannya dalam Pembangunan Desa Sangat Tertinggal di Kecamatan Kampar Kiri Hulu

No	Stakeholder	Peran/Kepentingan
1.	Kemendes PDTT	Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan kebijakan, dan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal serta pengelolaan data dan informasi. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kebijakan
2.	Kementerian LHK	Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dan lainnya.
3.	Kementerian PUPR	Perumusan kebijakan, koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan lainnya.
4.	DPRD	Pengusulan anggaran terkait dengan pembangunan di desa sangat tertinggal

No	Stakeholder	Peran/Kepentingan
5.	Bappeda	Perencanaan terkait dengan pembangunan di desa sangat tertinggal
6.	Dinas PMD	Intervensi, sosialisasi dan pelatihan dalam pengisian indikator indeks desa membangun
7.	Dinas PUPR	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, operasional, pembangunan, pengelolaan, peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan.
8.	Camat Kampar Kiri Hulu	Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di desa-desa dalam wilayah kecamatan dan mengumpulkan data terkait kebutuhan dan kondisi desa.
9.	Pemerintah Desa	Membuat RPJMDes sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.
10.	BBKSDA	Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya serta koordinasi teknis pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sumber : Data Olahan Penulis, 2024

Berdasarkan tabel diatas mengapa diperlukannya kolaborasi antar kementerian, pemerintah daerah, dinas, kecamatan, pemerintah desa maupun pihak ketiga karena berbagai alasan yang terkait dengan keberlanjutan upaya pembangunan seperti desa yang sangat tertinggal pada umumnya sering menghadapi berbagai masalah kompleks seperti kemiskinan, kurangnya infrastruktur, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang rendah dan terbatas, kemudian isu lingkungan.

Untuk mensejahterakan kehidupan desa kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu untuk pencapaian target Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Kampar tidak hanya menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah saja tetapi menjadi kewajiban semua stakeholder di berbagai

level baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Terlebih lagi 9 desa dari 23 desa sangat tertinggal yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu berada dalam kawasan suaka margasatwa dimana dalam pengentasan desa sangat tertinggal di wilayah tersebut membutuhkan kerja sama lintas kementerian maupun pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Masalah-masalah seperti ini memerlukan pendekatan multidimensional yang hanya bisa dicapai apabila terjalin kolaborasi antar berbagai sektor.

Kolaborasi berbagai kementerian dan pemerintah daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kecamatan dan pemerintah desa maupun pihak ketiga diperlukan karena masing-masing stakeholder memiliki sumber daya, keahlian dan kapasitas yang berbeda-beda. Dengan adanya kolaborasi memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal dan memastikan bahwa berbagai aspek pembangunan dapat ditangani secara efektif.

Dalam pengentasan desa sangat tertinggal diperlukan perencanaan yang melibatkan semua stakeholder dan memastikan bahwa dalam perencanaan ini mencakup tujuan jangka pendek,

menengah dan panjang dengan indikator keberhasilan yang jelas. Namun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 belum ada menyinggung terkait dengan penanganan desa sangat

tertinggal secara langsung akan tetapi terdapat beberapa strategi dalam penjabaran visi dan misi yang masuk ke dalam peningkatan nilai IDM. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Beberapa Strategi di dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 yang termasuk ke dalam IDM

No	Indeks Komposit	Dimensi	Strategi
1.	Indeks Ketahanan Sosial	Kesehatan	-Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas. -Mempercepat penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
		Pendidikan	-Mencukupi kebutuhan sarana prasarana pendidikan pada kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan yang rendah. -Pengembangan PAUD -Mendorong fasilitas dan fungsi perpustakaan dalam menarik minat baca masyarakat.
		Pemukiman	-Meningkatkan dukungan system irigasi dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana terpadu. -Menyediakan layanan air bersih di Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar. -Memperluas cakupan wilayah penyediaan listrik. -Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informasi secara bertahap.
2.	Indeks Ketahanan Ekonomi	Ekonomi	-Mengembangkan dan menguatkan sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan wirausaha serta pembinaan dan pendampingan SDM calon maupun pelaku UMKM -Meningkatkan nilai tambah, kualitas, keragaman dan jangkauan pemasaran produk-produk UMKM yang berbasis pada prinsip pengembangan rantai nilai, keunggulan serta sumber daya lokal. -Mengembangkan lembaga pembiayaan atau bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank, serta advokasi pembiayaan bagi UMKM maupun koperasi.

No	Indeks Komposit	Dimensi	Strategi
			-Meningkatkan dan merehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan layanan pemerintahan.
3.	Indeks Ketahanan Lingkungan	Lingkungan	-Meningkatkan dukungan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan sarana prasarana terpadu. -Meningkatkan jumlah fasilitas sarana-prasarana penanggulangan bencana merata di seluruh wilayah.

Sumber : RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. Hasil Olahan Penulis, 2024

Dari tabel diatas penulis telah memetakan strategi apa saja yang tertulis di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disesuaikan dengan indikator indeks desa membangun yang terdiri dari 3 indeks komposit yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan. Karena pada dasarnya Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengentasan desa sangat tertinggal. Berbagai aspek dalam perangkat indikator Indeks Desa Membangun (IDM) menjadikan strategi dan pemberdayaan masyarakat di dalamnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik itu pemerintah sendiri maupun stakeholder lain di luar pemerintah.

Kemudian dalam implementasinya contohnya dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di 9 desa dalam kawasan suaka margasatwa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kampar berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam penanganannya seperti Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau, dan PLN. Dengan adanya koordinasi yang baik antar berbagai pihak dapat menghindari duplikasi upaya dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan memastikan bahwa pembangunan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, dalam kolaborasi tidak ada

satupun aktor yang dominan, dominan dalam pengertian maunya sendiri, maksud dan tujuan dan kepentingan sendiri karena pada dasarnya kolaborasi dilakukan bersama dalam mewujudkan satu tujuan yaitu pengentasan desa sangat tertinggal.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditulis berdasarkan penelitian lapangan dan hasil wawancara maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dari keempat strategi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengatasi desa sangat tertinggal, penulis menyimpulkan strategi kesejahteraan atau *the welfare strategy* yang paling dominan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dimana pemerintah sibuk untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan terutama dibidang sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian untuk strategi yang tanggap terhadap kebutuhan Masyarakat atau *the responsive strategy* Pemerintah Kabupaten Kampar belum mampu untuk memenuhi permintaan masyarakat atas kebutuhan internet di 20 desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. BBKSDA Provinsi Riau juga mengambil posisi penting dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan suakamargasatwa.

Strategi pertumbuhan atau *the growth strategy* pada tahun 2021 sampai 2022 pemerintah berupaya untuk melakukan

peningkatan di bidang prasarana pertanian dan pengembangan lembaga pembiayaan. Selanjutnya untuk strategi terpadu *atau the integrated strategy* penulis menilai bahwa belum ada keselarasan strategi dalam setiap program kegiatan antara pemerintah daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

H. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis melihat bahwa pelaksanaan strategi pembangunan desa sangat tertinggal oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dapat meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang membawa Kampar sebagai *zero* desa sangat tertinggal di tahun 2023. Dengan hal tersebut, penulis juga akan mengemukakan saran yang sekiranya dapat diterima oleh semua pihak.

1. Perlu adanya strategi pembangunan yang berkaitan langsung dengan pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tertera dalam setiap rancangan pembangunan baik itu jangka pendek, menengah maupun panjang.
2. Perlu adanya keselarasan strategi, program atau kebijakan yang dikerjakan antar Pemerintah Kabupaten Kampar beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga lain.
3. Koordinasi pihak kecamatan dengan pemerintah kabupaten dalam penanganan desa sangat tertinggal harus ditingkatkan.
4. Perumusan rencana pembangunan oleh pemerintah desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan mulai dari perencanaan agar dapat memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa tersebut.

I. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. (2013). Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Anwas Oos M. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Farida Nugrahani. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Husein Umar. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali
- Kampar, I. B. P. S. K. (2022). Statistik Daerah Kabupaten Kampar.
- Kampar, I. B. P. S. K. (2022). Kecamatan Kampar Kiri Hulu Dalam Angka.
- Rivai dan Darsono, Manajemen Strategis. Jakarta, 2015.
- Suryono, Agus. 2010. Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan. Malang : UB Press.
- Warjio. 2016. Politik Pembangunan Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi. Jakarta: Kencana.
- W.W. Rostow, "*The Stage of Economic Growth*" *tentang the five stages of growth a summary*

Skripsi/Tesis

- Eka Setyowati. Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Pedesaan Indeks Desa Membangun. Skripsi Program Pascasarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang. 2017
- Elsa. (2017). Strategi Pengembangan Desa Tertinggal di Nagari Batu Baya Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.
- Marsanda, N (2023). Strategi Pembangunan Pemerintah Kampung Dayun Dalam Meningkatkan tatus Desa Mandiri Pada Tahun 2018.

- Okthalia, D. (2019). Analisis Penyebab Rendahnya Pelayanan Dasar Desa Tertinggal di Kecamatan Siempat Nempu dan Pengaruh terhadap Kepuasan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Maju Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Putra, R. H. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Desa Danura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran).
- Rangkuti, A. Y. (2017). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Doctoral dissertation).
- Jurnal**
- Haridotama, H., & Darmastuti, A. (2023). Strategi Pengembangan Desa Tertinggal Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Transmigrasi Provinsi Lampung. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1243-1252.
- Hasanah, N. (2021). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 84-91.
- Latif, A., Irwan, I., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-15.
- Marlina, N. (2017). Strategi Pembangunan Desa Wisata Kandri Menuju Kesejahteraan Masyarakat. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 60-73
- Marta, A., Asrida, W., Amin, R. M., Febrina, R., & Harirah, Z. (2024). Pentahelix collaboration on environmental perspective: Handling underdeveloped villages in conservation forests. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 05006). EDP Sciences.
- Garis, R. R. (2017). Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di Kabupaten Ciamis (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 108-130.
- Peraturan dan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022